

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Ed. 1 Cet. 1., Jakarta: Sinar Grafika
- Aris Prio Agus Santoso, 2019, *Hukum Administrasi Negara (Sebuah Pengantar bagi Mahasiswa)*, Yogyakarta: Nuha Medika Yogyakarta, Cetakan I.
- Diana Halim Koentjoro dan Johannes Sardadi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, Ed. 2, hlm. 48.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fathur Rahman, 2018, *Teori Pemerintahan*, Malang: UB Press, Cetakan Peratama, [Teori Pemerintahan - Fathur Rahman - Google Books](#).
- Ishaq, H, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Penerbit Alfabeta, [Book-Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi Ishaq | Suparman Ruchban - Academia.edu](#).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Cet. 3, Jakarta: Kencana.
- M. Arba, 2018, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika
- Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum Di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet 7, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Petrus Soerjowinoto, 2018, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Katolik Soegijapranata.
- R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Cet. 11, Jakarta: Rajawali Pers
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, ed Awaludin Marwan, Cet. 8, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Shanty Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm.33.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ed. 5, Cet. 3, Yogyakarta: Liberty.
- Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika.

W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama.

SKRIPSI

Sukmawati, Ardina, 2013, “Pengawasan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”, Other Thesis, Prodi Ilmu Hukum UNIKA Soegijapranata, [PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN \(IMB\) - Unika Repository](#).

JURNAL

Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945”, Vol. 9, No. 4, [PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT-PEMERINTAH DAERAH DALAM OTONOMI SELUAS-LUASNYA MENURUT UUD 1945 | Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum \(unila.ac.id\)](#).

Denis Ventidenada Munif, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembangunan Bangunan Gedung Di Kota Semarang”, *MAGISTRA Law Review* 3, no. 2, [PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SEMARANG | Munif | MAGISTRA Law Review \(untagsmg.ac.id\)](#).

Roman Situngkir, 2022, “Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 3, [Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja | Situngkir | Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum \(bundamedia grup.co.id\)](#).

Wicipto Setiadi, 2009, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 6, No. 4, WWW: [220 \(peraturan.go.id\)](#).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, [UUD No. - \(bpk.go.id\)](#).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, [UU No. 28 Tahun 2002 \(bpk.go.id\)](#).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, [UU No. 26 Tahun 2007 \(bpk.go.id\)](#).

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang, [UU No. 12 Tahun 2011 \(bpk.go.id\)](#).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, [UU No. 15 Tahun 2019 \(bpk.go.id\)](#).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, [UU No. 13 Tahun 2022 \(bpk.go.id\)](#).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, [UU No. 23 Tahun 2014 \(bpk.go.id\)](#).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, [UU No. 2 Tahun 2015 \(bpk.go.id\)](#).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, [UU No. 2 Tahun 2015 \(bpk.go.id\)](#).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, [UU No. 30 Tahun 2014 \(bpk.go.id\)](#).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, [UU No. 6 Tahun 2023 \(bpk.go.id\)](#).
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, [PP No. 18 Tahun 2016 \(bpk.go.id\)](#).
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, [PP No. 18 Tahun 2016 \(bpk.go.id\)](#).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, [PP No. 16 Tahun 2021 \(bpk.go.id\)](#).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, [PP No. 21 Tahun 2021 \(bpk.go.id\)](#).
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, [Perda 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 - JDIH - Kota Semarang - Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Semarang \(semarangkota.go.id\)](#).
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, [Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 - JDIH - Kota Semarang - Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Semarang \(semarangkota.go.id\)](#).

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, [Perda 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang - JDIH - Kota Semarang - Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Semarang \(semarangkota.go.id\)](#).

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, [Perda 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang - JDIH - Kota Semarang - Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Semarang \(semarangkota.go.id\)](#).

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, [Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang - JDIH - Kota Semarang - Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Semarang \(semarangkota.go.id\)](#).

Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung, [Perwal 38 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung - JDIH - Kota Semarang - Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Semarang \(semarangkota.go.id\)](#).

Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, [Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang - JDIH - Kota Semarang - Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Semarang \(semarangkota.go.id\)](#).

Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, [Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang - JDIH - Kota Semarang - Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Semarang \(semarangkota.go.id\)](#).

Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, [Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang - JDIH - Kota Semarang - Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Semarang \(semarangkota.go.id\).](#)

Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, [Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang - JDIH - Kota Semarang - Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Semarang \(semarangkota.go.id\).](#)

Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, [Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang - JDIH - Kota Semarang - Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Semarang \(semarangkota.go.id\).](#)

INTERNET

Pemerintah Kota Semarang , “Gambaran Umum”, Profil Kota, Online, Internet, 23 November 2023, WWW: [Profil | Pemerintah Kota Semarang \(semarangkota.go.id\)](#)

Pemerintah Kota Semarang , “Gambaran Umum”, Profil Kota, Online, Internet, 23 November 2023, WWW: [Profil | Pemerintah Kota Semarang \(semarangkota.go.id\)](#)

Pemerintah Kota Semarang, “Visi Dan Misi”, Profil Kota, Online, Internet, 23 November 2023, WWW: [Profil | Pemerintah Kota Semarang \(semarangkota.go.id\)](#)

Distaru Kota Semarang, “Tentang Distaru”, Profil Distaru Kota Semarang, Online, Internet, 28 November 2023, WWW: [Tentang Distaru \(semarangkota.go.id\)](#)

DPMPTSP Kota Semarang, “Visi Dan Misi”, Profil DPMPTSP Kota Semarang, Online, Internet, 13 Desember 2023, WWW: [Visi dan Misi \(semarangkota.go.id\)](http://semarangkota.go.id)

Jatengdaily, “Tak Ber-IMB, Pembangunan Gerai Starbuck di Museum Mandala Bhakti Dihentika”, Online, Internet, 12 Februari 2020, WWW: [Tak Ber-IMB, Pembangunan Gerai Starbuck di Museum Mandala Bhakti Dihentikan - jatengdaily.com.](http://jatengdaily.com)

Rahdyan Trijoko Pamungkas, “Bangunan Mewah di Jalan Kawi Kota Semarang Dibongkar, Irwan Sebut Banyak Pelanggaran”, Tribun Jateng 21 Juni 2019, Online, Internet, 10 September 2023, WWW: [Bangunan Mewah di Jalan Kawi Kota Semarang Dibongkar, Irwan Sebut Banyak Pelanggaran - Tribunjateng.com \(tribunnews.com\).](http://tribunnews.com)

